

# HASIL CEK\_C.11

*by C. 11*

---

**Submission date:** 25-Jan-2022 10:12AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1747566566

**File name:** C.11.pdf (733.79K)

**Word count:** 1739

**Character count:** 10488

## Brimob Sterilisasi 20 Gereja



**Tim Brimob Polda DIY saat sterilisasi di Gereja Keluarga Kudus Banteng.**

**SLEMAN (KR)** - Rangkaian perayaan Paskah di wilayah Hukum Polda DIY, berlangsung aman tanpa kejadian menyangkut peristiwa situasi yang kondusif ini tak lepas dari peran serta masyarakat.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto menyebut, pengamanan Paskah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pengalangan pasukan dan sterilisasi di sejumlah gereja. "Sejauh ini pelaksanaan Paskah berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan sesuai SOP yang sudah diterapkan oleh pimpinan," ujarnya, Jumat (24).

Sehari sebelumnya, Satuan Brimob Polda DIY melakukan sterilisasi gereja yang digunakan untuk rangkaian ibadah Paskah. Di wilayah hukum Polres Sleman, sebanyak 20 gereja disterilisasi oleh pasukan Brimob ini. "Ada 81 gereja di Sleman dan yang disterilisasi sebanyak 20 gereja," ungkap Kabag Operasional Polres Sleman Kompol Danang Kuntadi di Gereja Keluarga Kudus Banteng Ngatik, Kamis (14).

Dikatakan, saat perayaan Paskah, tiap gereja dijaga minimal 10 personel. Jumlah tersebut belum termasuk pengamanan tertutup dan pengamanan dari TNI, ormas dan internal gereja. Sterilisasi di Gereja Keluarga Kudus Banteng dipimpin Panit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda DIY Aiptu Hanang.

Romo Paroki Gereja Keluarga Kudus Banteng, Mathews Widyut MSR mengatakan, umat yang hadir pada ibadah Paskah 2021 adalah mereka yang telah mendaftarkan diri. Mereka juga mendapatkan barcode sebelum memasuki gereja. (Ayu)-f

## Pembak Mulai Pendataan Keluarga

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman melalui Dinas P3AP2KB meluncurkan Pendataan Keluarga tahun 2021. Peluncuran ini diawali dengan pendataan keluarga Bupati Sleman di Rumah Dinas Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman di Padukuhan Jaban Tridadi Sleman, Kamis (14).

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Maflihidati Nuraini mengatakan, Pendataan Keluarga 2021 (PK2021) dilaksanakan pada 1 April hingga 31 Mei 2021. PK2021 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai dengan wilayah administrasi terkecil.

"Target Kepala Keluarga yang akan didata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Sleman sebanyak 321.568 KK yang terbagi dalam metode formulir sebanyak 23.007 KK dan metode smartphone sebanyak 298.561 KK," jelas Linda.

Terkait itu, Bupati Kusniandi mengajak seluruh warga Sleman melaksanakan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut. Kader pendata akan mendatangi setiap keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Has)-f

## Bupati Diminta Keluarkan SE Panduan Kegiatan

**SLEMAN (KR)** - DPRD Sleman meminta kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) panduan kegiatan masyarakat. Hal itu antispasi terjadinya klaster baru. Mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniasan mengatakan, SE ini sangat penting untuk panduan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan. "Kami sudah koordinasi dengan Bupati dan akan mengeluarkan SE. Tapi kami minta, SE itu harus operasional dan aplikatif sehingga nanti bisa jadi panduan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan," katanya.

Menurut Arif, pentingnya SE dikarenakan sebentar lagi akan banyak kegiatan

masyarakat seperti sadranan, pengajian, dan kegiatan lainnya. Dengan harapan masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatan sosial maupun keagamaan.

Abdul Kadir menambahkan, kejadian di Blekik yang merupakan klaster terakhir ini harus menjadi pembelajaran bersama. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diperketat lagi. "Ini dibutuhkan kesadaran semua pihak," tandasnya.

Sedangkan Koordinator Lapangan Satgas Covid-19 Kaharhan Sardonoharjo Zuli Susanto mengatakan, dengan adanya kluster terakhir ini ada 64 orang warga Blekik yang positif



**Arif Kurniasan menyerahkan bantuan ke Lurah Sardonoharjo.**

Covid-19. Sebagian besar masyarakat yang positif sudah dirujuk di Rumah Sakit Gembira. "Ada sekitar 60 orang yang isolasi mandiri karena salah satu

dari keluarganya terpapar Covid-19. Sedangkan bagi warga yang keluarganya tidak positif, masih boleh melakukan aktivitas," jelasnya. (Sni)-f

## Forkopmda Bagikan Helm Gratis



**Bupati Kusniandi dan Wakil Bupati Kusniandi membagikan helm gratis untuk pengendara yang melintas.**

**SLEMAN (KR)** - Bupati bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopmda) Kabupaten Sleman menggelar acara Kampay Berhela Lintas di GOR Pangkajene Sleman, Kamis (14). Pada kesempatan itu dibagikan 150 helm gratis dan 300 masker kepada pengendara jalan yang melintas.

Menurut Bupati Kusniandi, dipilhinya GOR Pangkajene mengingat pada hari bertepatan pasaran Pahang sehingga tentu aktifitas masyarakat yang melintas ke Pasar Sleman jauh lebih ramai.

"Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman pengendara, memberikan apresiasi kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas,"

## Indonesia Butuh Sebuah Haluan Negara

**SLEMAN (KR)** - Negara memerlukan keuletakan untuk melakukan pembangunan nasional secara kuat, terukur, dan konsisten. Oleh karenanya kehadiran pokok-pokok haluan negara yang diatur dalam konstitusi merupakan sebuah keistimewaan.

Demikian dikatakan, Ketua Kolompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR Dr Intisawati Ayu SH MH dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pokok Pokok Haluan Negara dan Amanah dalam Terbatas UUD 1945 di Ruang Multimedia, Gedung Pusat UGM, Kamis (14). FGD diikuti anggota DPD RI, Pimpinan Dewan Guru Besar UGM serta para Guru Besar UGM.

Tujuan FGD ini, kata Intisawati, antara lain untuk menginventarisasi pandangan dan pendapat akademisi, pakar/ahli terhadap Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Yakni berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR dan penataan ke-



**Diskusi UGM dan DPD RI soal haluan negara.**

## GILA IJAZAH (DIPLOMA DISEASE): SIAPA YANG SALAH??



**MATA AIR HARAPAN, Dr. Dody Hartanto, M.Pd. Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**

hidup masa depan. Namun, tanpa disadari lalu pemakaian mengenai melanjutkan studi dipersiapkan menjadi pemegang gelar dan ijazah.

Dore (1978) membuat perbedaan antara sekolah yang mendidik dan sekolah yang hanya menghasilkan kualifikasi untuk bekerja. Dia berpendapat bahwa efek dari sekolah, cara itu, bukanlah kapasitas dan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu tidak hanya bergantung pada apa yang dia pelajari atau cara dia mempelajarinya, tetapi juga pada mengapa dia mempelajarinya. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai upaya untuk menambah penanaman nilai keabadian dan penyediaan seorang individu di masa yang akan datang.

Seseorang mengalami masalah gila menjadi serjani ini memunculkan berbagai masalah. Individu menjadi tidak bahagia dalam menjalani studi atau bahkan mengalami kegagalan studi. Masalah lain yang diperoleh adalah tidak tercapainya kompetensi yang diperlukan pada saat pekerjaan, sehingga saat bekerja individu akan rentan bermasalah dengan perusahaan atau atasan. Selain itu, bagi orang tua dengan ekspedisi yang berlebihan justru akan menimbulkan banyak kekesediaan dan tekanan. Berbagai tekanan tersebut bagi orang tua jika tidak dapat dikontrol dengan baik akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Fenomena gila ijazah ini harus kita minimalkan agar tidak menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Ada rumus kecil yang dapat kita jadikan panduan untuk meminimalis masalah tersebut. Rumus tersebut disingkat dengan WARAS. Pertama kita WAJIB melakukan komunikasi dengan anak mengenai pilihan studi di perguruan tinggi yang akan dipilih yang harus mengikuti pilihan atau ajakan teman sebangun tanpa mengetahui alasan dibalik pilihan tersebut. Kedua perlu dilakukan komunikasi dengan pilihan tersebut. Ketiga adalah sikap rencana yang lain apabila anak tidak dapat diterima atau masuk pada pilihan yang telah menjadi keputusannya. Perencanaan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan hal hal yang mungkin gagal atau tidak bisa diterima di Perguruan Tinggi yang diinginkan. Sekolah memang merupakan hal penting, namun tidak hanya ijazah sebagai tujuan utama.

Menjauhi Diploma Disease atau bisa disebut gila memperoleh ijazah ini telah dipopulerkan Ronald Dore pada 1976. Tulisan Dore merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi kondisi ijazah dari masyarakat. Bergegas studi dan literatur merupakan bahasa pendidikan telah lama dikaitkan dengan ekonomi. Studi lanjut di Perguruan Tinggi pada hakikatnya untuk menambah bekal dan peningkatan kapasitas serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja dan

kehidupan masa depan. Namun, tanpa disadari lalu pemakaian mengenai melanjutkan studi dipersiapkan menjadi pemegang gelar dan ijazah.

Dore (1978) membuat perbedaan antara sekolah yang mendidik dan sekolah yang hanya menghasilkan kualifikasi untuk bekerja. Dia berpendapat bahwa efek dari sekolah, cara itu, bukanlah kapasitas dan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu tidak hanya bergantung pada apa yang dia pelajari atau cara dia mempelajarinya, tetapi juga pada mengapa dia mempelajarinya. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai upaya untuk menambah penanaman nilai keabadian dan penyediaan seorang individu di masa yang akan datang.

Seseorang mengalami masalah gila menjadi serjani ini memunculkan berbagai masalah. Individu menjadi tidak bahagia dalam menjalani studi atau bahkan mengalami kegagalan studi. Masalah lain yang diperoleh adalah tidak tercapainya kompetensi yang diperlukan pada saat pekerjaan, sehingga saat bekerja individu akan rentan bermasalah dengan perusahaan atau atasan. Selain itu, bagi orang tua dengan ekspedisi yang berlebihan justru akan menimbulkan banyak kekesediaan dan tekanan. Berbagai tekanan tersebut bagi orang tua jika tidak dapat dikontrol dengan baik akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Fenomena gila ijazah ini harus kita minimalkan agar tidak menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Ada rumus kecil yang dapat kita jadikan panduan untuk meminimalis masalah tersebut. Rumus tersebut disingkat dengan WARAS. Pertama kita WAJIB melakukan komunikasi dengan anak mengenai pilihan studi di perguruan tinggi yang akan dipilih yang harus mengikuti pilihan atau ajakan teman sebangun tanpa mengetahui alasan dibalik pilihan tersebut. Kedua perlu dilakukan komunikasi dengan pilihan tersebut. Ketiga adalah sikap rencana yang lain apabila anak tidak dapat diterima atau masuk pada pilihan yang telah menjadi keputusannya. Perencanaan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan hal hal yang mungkin gagal atau tidak bisa diterima di Perguruan Tinggi yang diinginkan. Sekolah memang merupakan hal penting, namun tidak hanya ijazah sebagai tujuan utama.

Menjauhi Diploma Disease atau bisa disebut gila memperoleh ijazah ini telah dipopulerkan Ronald Dore pada 1976. Tulisan Dore merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi kondisi ijazah dari masyarakat. Bergegas studi dan literatur merupakan bahasa pendidikan telah lama dikaitkan dengan ekonomi. Studi lanjut di Perguruan Tinggi pada hakikatnya untuk menambah bekal dan peningkatan kapasitas serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja dan

## JADI BAGIAN KEISTIMEWAAN DIY

### Pemda DIY Fokus dan Prioritaskan Pengarusutamaan Gender

**YOGYA (KR)** - Pengarusutamaan gender selalu menjadi fokus perhatian dan prioritas bagi Pemda DIY. Bahkan sejak 2002 secara provinsi lain mengenai pengarusutamaan gender, Pemda DIY telah berjanji mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SE Gubernur DIY terkait dengan isu gender. Karena memperjuangkan kesetaraan gender di DIY menjadi salah satu keistimewaan DIY.

"Apabila persoalan itu tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, akan memunculkan permasalahan. Seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, penyimpangan perilaku masyarakat dan sederet masalah lainnya," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam acara pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020 di Gedung Pracimosono Kepatihan, Kamis (14).

Hadiri mendampingi Gubernur DIY antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Benny Suharsana yang merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Asesda Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Sumadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Rony Primanto Hari, Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Tnu Broto, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY serta aktivis gender, akademisi, pakar dan sebagainya.

DIY memanfaatkan pemangku kepentingan untuk memaksimalkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk itu, pihaknya menekankan kepada setiap OPD untuk bisa saling silang bekerja sama mewujudkan kesetaraan ini demi mewujudkan harkat martabat keseluruhan masyarakat.

Harapan akan semakin meningkatkan kualitas perempuan di bidang ekonomi yang berperan sebagai pembangkit keputusan dan meningkatkan penempatan sebagai legislator DPRD. "Dengan distapkannya indikator gender sebagai indikator kinerja utama Gu-



**Gubernur DIY Sultan HB X saat verifikasi lapangan pemberian APE di DIY.**

berner, maka para pemangku kepentingan lainnya tidak hanya memandang gender menjadi kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk setara," ungkapnya.

Sultan menambahkan, DIY sangat mengedepankan berwujudnya keadilan dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan, sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang sama. Hak dalam hal meningkatkan kesejahteraan keadilan dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan, sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang sama. Hak dalam hal meningkatkan kesejahteraan keadilan dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan, sehingga seluruh masyarakat memiliki hak yang sama.

Harapannya DIY bisa memperhatikan kategori Mentor dan semakin memacu untuk bergerak lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan," terang Sultan.

Sementara Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani mengatakan DIY sudah mendapatkan anugerah mentor selama dua tahun berturut-turut. APE adalah penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (KL), Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh pemerintah pusat atas komitmen-nya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anugerah ini merupakan apresiasi dari pusat atas kerja keras DIY mewujudkan kesetaraan gender untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pemberian APE merupakan bentuk dukungan pusat dari Presiden Jokowi bagi Pemda yang memang telah mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender. DIY memang memberikan perkembangan yang menggembirakan terkait PUG selama dua tahun terakhir. Harapannya DIY bisa memperhatikan kategori Mentor dan semakin memacu untuk bergerak lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan." (Ria/ra)-f

# HASIL CEK\_C.11

---

## ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On